

MAJALAH SUARA PASURUAN



MAJALAH BULANAN
PEMERINTAH
KABUPATEN
PASURUAN

■ KREATIF ■ DINAMIS ■ ASPIRATIF

EDISI NOVEMBER 2023 | MINGGU 3



**32 PPPK Pemkab Pasuruan
Terima SK Pengangkatan**



Cover : Perwakilan dari 32 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menerima SK pengangkatan.

Foto : Martin

IJIN TERBIT :
2479/ Dirjen PPG/ STT/ 1998

PENERBIT :
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan

PELINDUNG/PENASEHAT :
Bupati Pasuruan / Wakil Bupati Pasuruan

PEMBINA :
Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan

PENANGGUNG JAWAB :
Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan

PEMIMPIN REDAKSI :
Arifin

REDAKTUR PELAKSANA :
Heni Nurhayati
Akhmad Rohim

SEKRETARIS REDAKSI :
Maria Ulfa

REDAKSI :
Emil Akbar, Dewi Gita Puspitasari, Ilmi Zamzam,
Eka Rosmida Oktavia, Yuni Setiono, Achmad
Fatchur Rozaq, Achmad Chusaeri, Ahmad Efendi,
M. Indra, Robiatul Adaweyah, M. Yusuf

LAYOUT :
Yudhi Dharma

ALAMAT REDAKSI :
Jl. Raya Raci Km9 Kecamatan Bangil
Kabupaten Pasuruan Telp. (0343) 429064

E-mail:
diskominfo@pasuruankab.go.id

EDITORIAL

Mari Jaga Netralitas Pemilu 2024

Menyongsong tahun Pemilu 2024, Pj Bupati Pasuruan, Andriyanto meminta para aparatur sipil negara (ASN) agar mampu mengendalikan segala ucapan, perilaku dan tindakan yang mengarah pada keberpihakan salah satu kontestan. ASN harus menjaga netralitas dari pengaruh partai politik atau keberpihakan pada salah satu parpol/caleg/capres atau calon kepala daerah. Sebab netralitas ASN telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Di sisi lain, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten Pasuruan melibatkan berbagai komunitas untuk ikut mengawasi seluruh tahapan Pemilu 2024. Puluhan perwakilan lintas komunitas seperti BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), FORKUGAMA (Forum Komunikasi Umat Beragama) Pasuruan, KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) Pasuruan, Kwartir Cabang Pramuka Pasuruan, HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) Pasuruan, Asosiasi Jurnalis Pasuruan Bersatu, diundang. Mereka diajak untuk mengawasi 4 isu penting yang kerap kali terjadi dalam Pemilu.

Begitu juga KPU Kabupaten Pasuruan yang mengingatkan peserta Pemilu untuk segera mendaftarkan pelaksana kampanye dan tim kampanye masing-masing paling lambat tiga hari sebelum kampanye dimulai. Batas akhir yang sudah ditentukan dalam peraturan KPU (P-KPU) pendaftaran pelaksana kampanye dan tim kampanye adalah tanggal 25 November.

Tidak hanya pelaksana kampanye dan tim kampanye Pemilu 2024. Peserta pemilu juga diminta untuk mendaftarkan akun media sosial (medsos). Kata Suyatmin, pendaftaran bisa langsung ke helpdesk sesuai jam kerja maupun melalui aplikasi Sikadeka atau Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) Pemilu Tahun 2024.

Di samping itu, dalam rangka menjaga kondusifitas situasi jelang Pemilu 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan menggelar rapat koordinasi dan sosialisasi penguatan tugas dan fungsi Komite Komunikasi Digital (KKD). Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan, Ridwan Harris menyampaikan KKD harus menjadi garda terdepan dalam menciptakan kondusifitas pemilu, serta diperlukan adanya sinergitas antara pemerintah dan komunitas melalui forum KKD yang sudah terbentuk.

Tugas Tim KKD adalah memberikan edukasi digital kepada masyarakat terkait informasi yang beredar di media sosial, Komite Komunikasi Digital (KKD) menjadi solusi sebagai lembaga yang dapat membantu memvalidasi kebenaran sebuah informasi atau berita. (dgp)



Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten Pasuruan melibatkan berbagai komunitas untuk ikut mengawasi seluruh tahapan Pemilu 2024.

Puluhan Komunitas di Kabupaten Pasuruan Diajak Awasi Pemilu 2024

Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten Pasuruan melibatkan berbagai komunitas untuk ikut mengawasi seluruh tahapan Pemilu 2024. Seperti yang terlihat di salah satu hotel di Kawasan Kecamatan Prigen, Sabtu (18/11/2023) pagi.

Puluhan perwakilan lintas komunitas seperti BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), FORKUGAMA (Forum Komunikasi Umat Beragama) Pasuruan, KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) Pasuruan, Kwartir Cabang Pramuka Pasuruan, HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) Pasuruan, Asosiasi Jurnalis Pasuruan Bersatu, diundang.

Mereka diajak untuk mengawasi 4 isu penting yang kerap kali terjadi dalam Pemilu.

Koordinator divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Ahmad Thoifur Arif mengatakan, Bawaslu punya amanat untuk memberikan pendidikan dan pemahaman kepada masyarakat secara luas tentang pengawasan Pemilu.

Khususnya 4 isu penting yaitu netralitas ASN, disinformasi atau hoak, money politik dan politisasi SARA. Empat hal tersebut harus dikawal agar tak ada pelanggaran yang mencederai pemilu itu sendiri.

"Netralitas ASN, berita hoak, politik uang dan politisasi SARA itu jadi permasalahan krusial yang harus diawasi. Maka dari itu, kita gandeng berbagai komunitas untuk menjadi kepanjangan tangan Bawaslu juga," katanya.

Konteks di lapangan, masyarakat yang tergabung dalam komunitas tertentu dapat menjadi pengawas partisipatif. Sehingga punya PR (pekerjaan rumah) untuk mentransformasikan ilmunya kepada para anggotanya.

"Diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam mengawal Pemilu tanpa ada pelanggaran. Supaya masyarakat agar tahu bahwa politik uang menjadi salah satu bentuk pelanggaran pidana. Ada konsekuensi hukumnya apabila terbukti melakukannya," terang Arif.

Outputnya, para peserta akan menyusun rancangan tindak lanjut (RTL) dengan membuat kegiatan di komunitas masing-masing. Agar pengawasan partisipatif dapat lebih mengakar di masyarakat. (email)



4 isu penting yaitu netralitas ASN, disinformasi atau hoak, money politik dan politisasi SARA menjadi topik bahasan utama.

FDR Pesawat Super Tucano Yang Jatuh di Desa Keduwung, Puspo, Ditemukan

Teka-teki apa penyebab jatuhnya pesawat TNI AU Super Tucano di Desa Keduwung, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan pada Kamis (16/11/2023) lalu, sepertinya akan segera terjawab.

(17/10/2023).

Tim beranggotakan 8 personel khusus TNI AU ini telah melakukan penyisiran sejak pukul 10.30 WIB.

Kepala Pusat Kelayakan Keselamatan Terbang dan Kerja Angkutan Udara, Marsekal Muda TNI, Benedictus Benny mengatakan bahwa kini tim masih berfokus untuk melakukan evakuasi bangkai dua badan pesawat Super Tucano.

"Kita sudah police line (sekitar lokasi jatuhnya pesawat) agar tidak rusak (bangkai pesawat), jadi yang tidak berkepentingan dilarang mendekat," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, jatuhnya dua pesawat TNI AU terjadi pada Kamis (16/11/2023) siang pukul 11.00 WIB.

Kesaksian warga sekitar sempat melihat empat pesawat terbang di langit, sebelum akhirnya diduga ada ledakan keras yang terdengar hingga belasan kilometer. Dua pesawat jenis Super Tucano ini diduga jatuh di dua lokasi berbeda.

Lokasi pertama tempat jatuhnya pesawat dengan nomor ekor TT 3013 berada di bawah tebing kawasan perhutani di Desa Keduwung, Kecamatan Puspo. Adapun lokasi kedua jatuhnya pesawat dengan nomor ekor TT 3111 berada di bukit Kundi.

Tepatnya di perbatasan antara Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo dengan Desa Wonorejo, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan.

Insiden pesawat latih TNI AU yang jatuh ini memakan korban jiwa empat orang perwira TNI AU yang berdinasi di Lanud Abdurrahman Saleh.

Yakni Letkol Pnb Sandhra Gunawan, Kolonel Adm Widiono, Mayor Pnb Yuda A. Seta, dan Kolonel Pnb Subhan. (emil)



Tim Investigasi TNI AU kini telah menemukan Flight Data Recorder (FDR) dari dua pesawat tersebut. Dan kini sudah dibawa

Lanud Abdulrachman Saleh, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Kadispen AU, Marsekal Pertama TNI R. Agung Sasongkojati mengatakan, FDR tersebut telah ditemukan pada Jumat (17/11/2023) kemarin.

"Flight Data Recorder sudah berada di Lanud Abdulrachman Saleh," ujar Agung saat jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, kemarin.

FDR sendiri sebenarnya sama dengan kotak hitam atau black box untuk merekam data penerbangan pesawat. FDR tersebut nantinya akan terbaca dengan teknologi khusus yang dimiliki TNI AU Lanud Abdurrahman Saleh.

Agung berharap nantinya penyebab pasti jatuhnya dua pesawat Super Tucano. Baik pesawat TNI AU bernomor sayap belakang TT 3111 maupun pesawat bernomor sayap belakang TT 3103.

"mudah-mudahan bisa kita baca untuk memberikan penjelasan lebih lanjut apa yang terjadi pada penerbangan," ungkapnya.

Sementara itu, Tim Investigasi TNI AU sendiri telah datang ke posko evakuasi di Penanjakan, Desa Wonokitri, Kabupaten Pasuruan sejak Jumat



32 PPPK Pemkab Pasuruan Terima SK Pengangkatan

Sebanyak 32 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menerima SK pengangkatan.

SK tersebut diserahkan oleh Penjabat (Pj) Bupati Pasuruan, Andriyanto dalam Apel Karyawan/Karyawati Pemkab Pasuruan di Halaman Graha Maslahat, Senin (20/11/2023) pagi.

Pantauan di lokasi, puluhan PPPK yang menerima SK secara simbolis diwakili oleh Bangun Triatmadji pada jabatan Ahli Pratama Pranata Komputer penempatan BKSDM.

Kemudian Kanty Noviya Sari pada jabatan Analis Pasar Hasil Perikanan Dinas Perikanan, serta Rudi Priyanto pada jabatan Ahli Pertama Perencanaan penempatan Bappelitbangda.

PTT/Kontrak.

"Saya yakin mereka semua telah melalui serangkaian proses seleksi yang panjang. Oleh karenanya atas nama Pemkab Pasuruan, kami ucapkan selamat kepada 32 PPPK yang baru saja menerima SK Pengangkatan," terangnya.

Dengan diterimanya SK Pengangkatan, Andri berharap kepada para PPPK agar cepat beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan yang baru. Sehingga bisa melaksanakan pekerjaan yang sudah menantinya.

"Sebab ada tanggung jawab besar yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," harapnya. (emil)



Perwakilan dari 32 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menerima SK pengangkatan.

Dari 32 jumlah PPPK yang menerima SK, 11 orang penempatan BKPSDM, 5 orang di Satpol PP, 2 orang di Dinas Perikanan, 2 orang di Dinas Perikanan, 1 orang di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 3 orang di Bappelitbangda, 1 orang di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2 orang di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 1 orang di Dinas Kesehatan, 1 orang di RSUD Bangil, 1 orang di RSUD Grati, dan 3 orang di Dinas Sosial.

"Alhamdulillah hari ini kami menerima SK Pengangkatan. Mudah-mudahan selalu bisa istiqomah bekerja dengan baik," ungkap Kanty, usai menerima SK.

Kanty dan 31 PPPK lainnya mengaku lega setelah SK pengangkatan mereka terima.

Bahkan, seorang Pj Bupati Pasuruan, Andriyanto mengaku ikutan bahagia, lantaran banyak non ASN yang bekerja puluhan tahun, tapi masih berstatus THL (tenaga harian lepas) maupun



Pj. Bupati Andriyanto berharap kepada para PPPK agar cepat beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan yang baru.

104 Pelajar MA se-Kabupaten Pasuruan Ikuti PORSENI Jawa Timur Tahun 2023

104 pelajar Madrasah Aliyah (MA) di Kabupaten Pasuruan siap mendulang banyak medali di ajang PORSENI (Pekan Olahraga dan Seni) MA tingkat Jawa Timur 2023 di Kabupaten Bojonegoro.

Sebelum resmi berlaga, mereka dilepas dan diberangkatkan oleh Pj Bupati Pasuruan, Andriyanto dari Halaman Graha

beberapa diantaranya ditargetkan dapat menambah pundi-pundi medali untuk Kabupaten Pasuruan. Diantaranya cabang bola voli, badminton dan cabang yang lainnya.

"Yang paling kita harapkan ya dari cabang bola voli, badminton dan tarik suara. Tapi yang lain kita harapkan untuk bisa memaksimalkan perolehan medali sendiri," katanya.

Ditargetkan, kontingen Kabupaten Pasuruan menurut Syaikhul dapat tembus di 5 besar perolehan medali di ajang PORSENI MAN Jawa Timur tahun 2023.

"Kalau tahun kemarin ada di peringkat ketujuh. Mudah-mudahan tahun ini bisa tembus ke lima besar perolehan medali," singkatnya.

Sementara itu, Pj Bupati Pasuruan, Andriyanto meminta para pelajar untuk tidak menjadikan target perolehan medali sebagai sebuah beban. Melainkan lebih fokus pada lomba yang akan diikuti.

"Fokus pada lomba saja. Bukan pada target juara, nanti malah jadi beban," pintanya.

Ia pun memotivasi para kontingen agar percaya diri, *nothing to loose* dan menikmati seluruh cabang olahraga dan seni yang dilombakan. Serta memulai seluruh perlombaan dengan berdoa.

Keempat hal tersebut apabila mampu dilaksanakan, maka juara akan cepat di genggam.

"Percaya diri, *nothing to loose* dan enjoy dalam bertanding. Itu kuncinya. Tapi sebelum bertanding, semuanya dimulai dengan berdoa. Mudah-mudahan jadi juara," tutupnya. (emil)



Maslahat, Senin (20/11/2023) pagi.

Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pasuruan, Syaikhul Hadi mengatakan, kontingen Kabupaten Pasuruan akan mengikuti 9 cabang seni dan 7 cabang olahraga.

Untuk cabang seni terdiri dari MTQ putra dan putri, Tahfidz Qur'an, Fahmil Qur'an, kaligrafi, desain grafis, pidato bahasa arab, menyanyi, pidato bahasa inggris dan cipta baca puisi.

Sedangkan untuk cabang olahraga seperti Atletik, bola voli putra dan putri, catur, futsal, badminton, tenis meja dan pencak silat

Dari seluruh cabang olahraga dan cabang seni yang dilombakan,



- 1 Kontingen Kabupaten Pasuruan akan mengikuti 9 cabang seni dan 7 cabang olahraga.
- 2 104 Pelajar MA se-Kabupaten Pasuruan Ikuti PORSENI Jawa Timur Tahun 2023.

Songsong Tahun Pemilu, Pj Bupati Andriyanto Minta ASN Jaga Sikap, Perilaku dan Tindakan



Songsong Tahun Pemilu, Pj Bupati Andriyanto Minta ASN Jaga Sikap, Perilaku dan Tindakan.

Menyongsong tahun Pemilu 2024, Pj Bupati Pasuruan, Andriyanto meminta para aparatur sipil negara (ASN) agar mampu mengendalikan segala ucapan, perilaku dan tindakan yang mengarah pada keberpihakan salah satu kontestan.

Permintaan tersebut ia sampaikan saat memimpin Apel Karyawan/Karyawati Pemkab Pasuruan di Halaman Graha Maslahat, Senin (20/11/2023).

Menurutnya, ASN harus menjaga netralitas dari pengaruh partai politik atau keberpihakan pada salah satu parpol/caleg/capres atau calon kepala daerah. Sebab netralitas ASN telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Di mana setiap ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

"Jangan sampai ada ASN yang salah ucap atau menunjukkan sebuah simbol yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau parpol tertentu yang berkontestasi dalam Pemilu 2024," katanya.

Dijelaskan Andri, di tengah arus informasi dan teknologi, hal yang paling patut mendapat perhatian bersama para ASN dalam menjaga netralitas adalah bijak menggunakan media sosial. Hal ini rentan dan berpotensi menjerat ASN melanggar asas netralitas.

"Ada sejumlah lembaga, termasuk masyarakat secara umum mengawasi pelaksanaan Pemilu 2024, karena itu perlu menjaga diri, tetap netral di Pemilu 2024 dengan memahami aturan yang mengikat ASN sebagai abdi negara, serta berani menolak dengan tegas jika ada pihak atau calon peserta pemilu yang ingin memanfaatkan ASN untuk kepentingannya,"sebutnya.



Para ASN wajib menjaga netralitas politiknya.

Apabila ada pelanggaran yang dilakukan ASN, maka dalam UU sudah diatur sanksi yang akan diterima. Kata Andri, sanksi mulai peringatan secara lisan, tertulis hingga penurunan pangkat atau jabatan.

"Tentunya ada sanksi bagi ASN yang kedapatan terlibat dalam politik praktis. Sebagai ASN sudah banyak aturan yang mengatur, mana yang boleh, mana yang tidak," ucapnya. (emil)

464 PNS Pensiun di 2024

Pj Bupati Andriyanto Beri Pembekalan



Sebanyak 464 PNS (pegawai negeri sipil) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan akan memasuki masa purna tugas pada Tahun 2024.

Tahun 2024 mendatang, sebanyak 464 PNS (pegawai negeri sipil) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan akan memasuki masa purna tugas alias pensiun.

Dari jumlah tersebut, ada beberapa pejabat Eselon II dan III yang akan mengakhiri tugasnya sebagai seorang PNS. Diantaranya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disparbud), Hasbullah yang akan purna tugas di bulan Agustus.

Selanjutnya adalah Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Hanung Widya Sasongko yang akan purna tugas per 25 Oktober 2024.

Ada pula nama-nama pejabat eselon III seperti Camat Prigen, Akhmad Mulyono; Kabag Perekonomian, Wiyoso Hadinoto; Camat Gempol, Komari; Sekretaris DPRD, Moh Ridwan serta Rachmad Yudi Harianto per 4 Januari memasuki purna tugasnya.

Terhadap para PNS yang akan memasuki masa purna tugas

(20/11/2023).

Melalui pembekalan ini, Andri berharap kepada PNS yang akan purna tugas bisa saling sharing pendapat untuk mengisi pensiun yang akan dijalani.

Selain itu, ia juga menginginkan kepada para PNS yang purna tugas dapat membuka wawasan dalam mengisi pensiun, serta bagaimana menyiapkan masa pensiun dengan kesibukan yang baru.

"Sebentar lagi di tahun 2024 kemungkinan besar akan mempunyai rutinitas baru. Ada yang sibuk dengan usaha tokonya. Ada yang jadi petani, pengusaha, bahkan mungkin ada yang mengatakan bahwa pensiun gak pensiun tetap sibuk, wah itu keren," terangnya.

Di akhir sambutannya, Andri mendoakan agar seluruh PNS yang akan memasuki masa pensiun senantiasa sehat, panjang umur, dan menjadi momen untuk memperbanyak beribadah

kepada Allah SWT.

"Kalau jaminan hari tua, tabungan hari tua, tabungan pensiun itu sudah pasti ada. Bahkan Taspen Bank Mandiri punya program yang bisa dikerja samakan dengan para pensiunan. Saya doakan semuanya sehat, panjang umur dan semakin dekat dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, bahkan ada banyak waktu untuk beribadah," harapnya. (emil)



Ada beberapa pejabat Eselon II dan III yang akan mengakhiri tugasnya sebagai seorang PNS, diantaranya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disparbud), Hasbullah.

KPK Dorong Pemkab Pasuruan Tingkatkan Nilai MCP Demi Hindari Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk bekerja lebih keras dalam meningkatkan skor Monitoring Center for Prevention (MCP).

Dorongan tersebut disampaikan Ketua Satgas Koordinator Supervisi dan Pencegahan Korupsi KPK, Irawati saat melakukan Sosialisasi Pencegahan Korupsi untuk Pemkab Pasuruan di Hotel Ascent Premierre, Selasa (21/11/2023) siang.

Menurutnya, MCP merupakan salah satu bentuk pengendalian internal yang sangat penting untuk pemberantasan korupsi di daerah. Untuk bisa meningkatkannya, maka seluruh OPD (organisasi perangkat daerah) harus menaati 8 area program intervensi pencegahan korupsi terintegrasi.

"Kebetulan ada Pak Pj Bupati Pasuruan yang hadir, jadi kami meminta Pemkab Pasuruan agar bekerja lebih keras untuk menaati delapan area mprogram intervensi pencegahan korupsi terintegrasi," kata Irawati.

Adapun delapan area yang dimaksud meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa.

Kata Irawati, kedelapan area tersebut merupakan area-area yang selama ini menjadi celah rawan perilaku tindak pidana korupsi. Oleh karenanya, jika program-program tersebut dijalankan, KPK optimis celah-celah korupsi dapat ditutup.

"Caranya tentu dengan penguatan sistem serta menjalankan tata kelola yang menjunjung tinggi budaya antikorupsi. Hal ini sekaligus sebagai indikator atas komitmen Pemda dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik," tegasnya.

Sementara itu, Pj Bupati Pasuruan, Andriyanto menyambut baik langkah KPK yang turun gunung ke daerah untuk mendorong Pemkab Pasuruan agar dapat mengelola keuangan daerah dengan baik dan terhindar dari korupsi. Khususnya

meningkatkan nilai MCP yang saat ini masih di angka 60.

"Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Irawati, Pak Arif dan teman-teman KPK yang datang untuk mensosialisasikan pentingnya melakukan pencegahan korupsi dalam tata kelola pemerintahan. Karena masih ada waktu msampai januari, maka nilai MCP saya yakin akan terus naik lagi," ucapnya.

Andriyanto meyakini KPK datang untuk membantu Pemkab Pasuruan supaya pelaksanaan tata kelola pemerintahan semakin baik. Dalam internal Pemkab Pasuruan, ada Inspektorat yang terus melakukan monitoring dan supervisi.

Supervisi tersebut memiliki tujuan untuk menilai dan mengukur sejauh mana tata kelola pemerintahan diintegrasikan pada program pencegahan korupsi dan penyelewengan dalam bentuk lainnya. "Dengan harapan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Pasuruan akan semakin baik," singkatnya.

Pasca sosialisasi, pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas BRIDA (Badan Riset dan Inovasi Daerah) Provinsi Jawa Timur ini meyakini seluruh ASNnya untuk mengimplementasikan sistem yang ada di dalam tata kelola pemerintah, dapat berjalan dengan baik. Artinya, tidak ada upaya atau potensi untuk melakukan berbagai modus korupsi.

"Yang paling penting OPD bisa memahami definisi tata kelola pemerintahan yang baik dan benar, sesuai dengan peraturan, dna yang jelas terhindar dari potensi korupsi," tegasnya. (emil)



1 MCP merupakan salah satu bentuk pengendalian internal yang sangat penting untuk pemberantasan korupsi di daerah.

2 KPK Dorong Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tingkatkan skor Monitoring Center for Prevention (MCP).

Inspektorat Kabupaten Pasuruan Punya Layanan Pengaduan SEPAKAT

Inspektorat Kabupaten Pasuruan punya inovasi berupa layanan pengaduan yang dinamakan SEPAKAT.

Layanan ini diluncurkan oleh Pj Bupati Pasuruan, Andriyanto, Selasa (21/11/2023).

Pantauan di lokasi, acara tersebut juga dihadiri Ketua Satgas Koordinator Supervisi dan Pencegahan Korupsi KPK, Irawati; Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan; Sekda Yudha Triwidya Sasongko serta seluruh Kepala OPD dan Camat se-Kabupaten Pasuruan.

Inspektur Kabupaten Pasuruan, Rachmat Syarifuddin menjelaskan, SEPAKAT merupakan singkatan dari Sistem

Pengaduan dan Konsultasi Inspektorat Berintegritas.

Layanan ini terbuka untuk seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan hingga desa/kelurahan maupun masyarakat umum yang ingin konsultasi terkait pengelolaan keuangan daerah di masing-masing OPD, kecamatan, desa/kelurahan dan permasalahan lainnya.

Menariknya, layanan ini menurut Rachmat memudahkan para pegawai Pemkab Pasuruan dalam mengaksesnya. Utamanya tanpa harus datang ke Inspektorat secara face to face, melainkan teknologi.



Layanan SEPAKAT diluncurkan oleh Pj Bupati Pasuruan, Andriyanto.

“

Aplikasi ini siap menerima aduan dan konsultasi dari OPD sampai kecamatan dan desa tentang pengelolaan keuangan dan pemerintahan.

"Karena jaman sekarang sudah masa 5.0. Jadi meminimalisir pertemuan dan menggantinya dengan cukup lewat handphone atau komputer," singkatnya.

Lebih lanjut Rachmat menegaskan bahwa layanan ini berbasis web yang bisa dikunjungi oleh siapa saja dengan alamat <https://sepakat.pasuruankab.go.id/>.

"Silahkan bisa dibuka dan langsung memilih menu pengaduan dan diisi sesuai perintah yang ada di dalamnya," terangnya.

Sementara itu, Pj Bupati Andriyanto mengajak para OPD untuk memanfaatkan layanan pengaduan SEPAKAT secara massive.

"Nanti kita akan lihat dalam tiga bulan ke depan, bagaimana tren pengaduan melalui SEPAKAT milik Inspektorat. Apakah semua pegawai sudah memanfaatkannya secara maksimal atau lebih memilih konsultasi dengan cara lain," harapnya. (emil)

Mendagri Tito Karnavian Himbau Pimpinan Daerah untuk Berupaya Kendalikan Inflasi

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian pimpin rapat pengendalian inflasi daerah, edisi Minggu ketiga (M3) bulan November tahun 2023, yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara virtual bersama jajaran perangkat daerah di seluruh Indonesia, pada Senin (20/11/23) Pagi.

Di awal, Tito Karnavian menyampaikan terkait inflasi daerah provinsi yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH)/Proxy Inflasi tertinggi di minggu lalu, ia menegaskan perlu mendapatkan atensi, terutama di daerah yang mengalami proxy inflasi mencapai di atas 3,00%, mengingat batasan yang menjadi acuan atau patokan inflasi Nasional year on year yakni 2,56%, seperti yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai 3,68%. Dan sebaliknya, Tito Karnavian memberi apresiasi terhadap beberapa daerah yang mengalami proxy terendah seperti Provinsi Maluku Utara mengalami deflasi hingga -1,63%.

"Saya memberikan apresiasi tertinggi kepada daerah yang rendah atau deflasi ini, kita perlu belajar ilmunya apa, sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi terhadap daerah yang rendah ini" ungkapnya.

Deputi Badan Pusat Statistik (BPS) Bidang Distribusi dan Jasa, Dr Pudji Ismartini menjelaskan terkait Indeks Perkembangan Harga (IPH) di minggu ketiga bulan November terdapat beberapa komoditas pangan yang memberikan andil terhadap kenaikan IPH diantaranya Cabai Merah dengan rata-

rata harga Nasional Rp 63,413/kg terjadi di 357 Kabupaten/Kota, Cabai Rawit mencapai rata-rata harga Rp 75.576/kg dengan kenaikan tertinggi terjadi di Pulau Jawa, juga Gula Pasir dengan harga Rp 16.948/kg terjadi di 336 Kabupaten/Kota, dan terakhir Bawang Merah mengalami trend kenaikan harga dibanding minggu sebelumnya dengan rata-rata harga nasional Rp 29.667/kg. Dari beberapa komoditas tersebut Pudji Ismartini menyampaikan bahwa Cabai Merah mengalami fluktuasi harga tertinggi yang terjadi di 154 Kabupaten/Kota.

Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian menghimbau kepada pimpinan daerah untuk melakukan kerja sama antar daerah serta mengencangkan gerakan menanam guna menekan laju kenaikan harga bahan pangan cabai merah yang mengalami fluktuasi harga tertinggi.

Di akhir, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (BAPANAS), Dr Sarwo Edhy menyampaikan beberapa upaya yang dilakukan untuk mengendalikan inflasi yakni dengan memastikan ketersediaan cadangan bahan pangan, BAPANAS melalui Badan Pusat Logistik (Bulog) melakukan penyaluran bantuan bahan pangan sebanyak 10 kg setiap bulan kepada 21,3 jt keluarga penerima manfaat, dan bantuan penanganan stunting berupa telur dan daging kepada 1,4 jt keluarga penerima manfaat, melakukan gerakan pasar murah, gerakan menanam, dan sosialisasi makanan sehat dengan harapan masyarakat tidak berlebihan dalam mengonsumsi makanan. (Robiatul)



Kampanye Gemarikan, Ketua Forikan Jatim, Ny Arumi Elestianto Dardak Ajak Anak-Anak Suka Makan Ikan

Ketua Forikan (Forum Peningkatan Konsumsi Ikan) Jawa Timur, Ny Arumi Bachsin Elestianto Dardak berkunjung ke Kabupaten Pasuruan, Kamis (23/11/2023).

Kunjungannya kali ini tak lain untuk mensosialisasikan pentingnya ragam produk perikanan untuk peningkatan gizi keluarga.

Pantauan di lokasi, acara sosialisasi ini digelar di Pendopo Kecamatan Kejayan. Tak sendirian, istri Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak ini hadir dengan didampingi Pj Ketua Forikan Kabupaten Pasuruan, Ny Luhur Andriyanto.

Selama acara berlangsung, dua perempuan inspirasi ini bukan hanya mengedukasi kepada para orang tua dan anak akan pentingnya ikan sebagai lauk utama keluarga. Namun juga memberikan pemahaman bahwa ikan bisa dijadikan sebagai lauk pauk dengan tampilan yang lucu, menarik dan merangsang

ada peran besar dari Forikan Provinsi Jawa Timur maupun Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim. Utamanya dalam meningkatkan angka konsumsi ikan maupun potensi perikanan dan kelautan di Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

"Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jawa Timur yang mengalokasikan kegiatan ini. Ini menjadi salah satu bentuk sinergitas antara



Ny Arumi Elestianto Dardak bersama dengan Ny. Luhur Andriyanto demo masak dengan seorang chef.



Kampanye Gemarikan, Ketua Forikan Jatim, Ny Arumi Elestianto Dardak Ajak Anak-Anak Suka Makan Ikan.

insting anak suka makan ikan.

Dalam laporannya, Ny Luhur menjelaskan bahwa angka konsumsi ikan di Kabupaten Pasuruan terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Sebagai bukti, tahun 2021 lalu, angka konsumsi ikan di Kabupaten Pasuruan sebesar 47,75 kg/kapita/tahun. Di tahun 2022 naik menjadi 56,4 kg/kapita/tahun.

Kenaikan ini bukan tiba-tiba terjadi begitu saja. Melainkan dengan banyak program dan kegiatan yang menasar ke masyarakat secara langsung. Diantaranya pendidikan, pelatihan dan pendampingan. Baik pada usia dini, usia sekolah, serta pada usia produktif.

"Gemarikan (gerakan memasyarakatkan makan ikan) dan pengembangan produk bernilai tambah terus dilakukan setiap tahunnya. Kami lanjutkan program sebelumnya yang getol sekali sampai ke bawah, terutama ke semua kader dan para ibu rumah tangga sebagai sasaran utama program ini," katanya.

Tak hanya kegiatan yang berasal dari APBD saja, istri Pj Bupati Andriyanto ini menegaskan bahwa

Pemprov Jatim dengan Pemkab Pasuruan, serta antara Tim Penggerak PKK dan Forikan Jawa Timur," tegasnya.

Sementara itu, Ny Arumi Bachsin dalam sambutannya menegaskan bahwa menciptakan generasi muda yang berkualitas diawali dengan memperhatikan asupan gizi anak dalam keluarga.

"Ketika asupan gizi tercukupi dengan baik, maka anak akan tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, bermoral tinggi dan terpuji. Karena mereka merupakan aset yang akan menentukan kualitas peradaban bangsa," ucapnya.

Dengan kegiatan seperti ini, Arumi optimis kesadaran gizi individu dan masyarakat agar gemar mengkonsumsi ikan akan terus meningkat.

"Sinergitas program dan kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan edukasi pentingnya konsumsi ikan untuk peningkatan gizi keluarga, kesehatan, kecerdasan dan pertumbuhan otak pada anak. Dan ujungnya ikut memberikan kontribusi

si dan dukungan untuk penurunan angka stunting di Kabupaten Pasuruan," tutupnya. (emil)





Jelang tahapan kampanye Pemilu 2024, KPU Kabupaten Pasuruan selenggarakan sosialisasi tentang media sosial.

KPU Kabupaten Pasuruan Ingatkan Parpol Segera Daftarkan Pelaksana Kampanye dan Akun Medsosnya

Jelang tahapan kampanye Pemilu 2024, KPU Kabupaten Pasuruan mengingatkan peserta Pemilu untuk segera mendaftarkan pelaksana kampanye dan tim kampanye masing-masing paling lambat tiga hari sebelum kampanye dimulai.

Suyatmin selaku Anggota KPU Divisi Sosdiklih (Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas (Partisipasi Masyarakat) dan SDM KPU Kabupaten Pasuruan mengatakan, kampanye akan dimulai pada tanggal 28 November 2023. Oleh karenanya, batas akhir yang sudah ditentukan dalam peraturan KPU (P-KPU) pendaftaran pelaksana kampanye dan tim kampanye di tanggal 25 November.

"Paling lambat tanggal 25 november atau tiga hari sebelum kampanye dimulai," kata Suyatmin saat memimpin Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pemberitaan Kampanye Pemilu 2024 di KPU Kabupaten Pasuruan, Jumat (24/11/2023) siang.

Tidak hanya pelaksana kampanye dan tim kampanye Pemilu 2024. Peserta pemilu juga diminta untuk mendaftarkan akun media sosial (medsos). Kata Suyatmin, pendaftaran bisa langsung ke helpdesk sesuai jam kerja maupun melalui aplikasi Sikadeka atau Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) Pemilu Tahun 2024.

"Pendaftaran bisa secara manual dengan langsung datang ke KPU atau melalui aplikasi Sikadeka," terangnya.

Dijelaskan Suyatmin, KPU sudah harus menerima pendaftaran pelaksana kampanye partai politik Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten maksimal tanggal 25 November mendatang.

Hal yang sama, terkait pelaksana kampanye Paslon Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten. Serta tim kampanye Paslon Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten, kecamatan dan kelurahan/desa, batas akhir masa pendaftaran sampai 25 November mendatang.

"Akun medsos resmi Parpol Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan juga maksimal tanggal 25 November sudah kami terima pendaftarannya," terang Suyatmin.

Dia menambahkan, selain sudah menyampaikan dalam rapat resmi dan sosialisasi. Pihak KPU Kabupaten Pasuruan juga sudah berkirim surat ke seluruh parpol Peserta Pemilu, agar segera mendaftarkan pelaksana dan tim kampanye, serta akun medsos.

"Juga kembali kami sampaikan hari ini, dalam acara Bimtek. Agar segera mendaftarkan sebelum masa akhir," terangnya.

Hanya saja, hingga hari ini, KPU Kabupaten Pasuruan baru menerima 3 parpol yang telah mendaftarkan pelaksana kampanye beserta akun media sosial secara manual.

Sedangkan dalam aplikasi, Suyatmin mengaku belum mengecek ada tidaknya parpol yang mendaftarkan pelaksana kampanye dan akun medsos nya ke KPU.

"Untuk sementara kami baru menerima 3 parpol yang mendaftarkan pelaksana kampanye dan akun medsosnya. Tapi itu secara manual. Kalau yang aplikasi masih belum kami cek," tegasnya. (emil)



Pendaftaran pelaksana kampanye partai politik Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten maksimal harus masuk tanggal 25 November.



Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan menggelar rapat koordinasi dan sosialisasi Komite Komunikasi Digital (KKD) di Aula Hotel Dalwa.

KKD Menjadi Solusi Dalam Menangkal Berita Hoax

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan menggelar rapat koordinasi dan sosialisasi penguatan tugas dan fungsi Komite Komunikasi Digital (KKD) Kabupaten Pasuruan bertempat di Aula Hotel Dalwa Jl Raya Raci - Bangil Kabupaten Pasuruan, Rabu (22/11/2023).

Acara dimulai pada pukul 08.00 WIB yang dihadiri Asisten III, Digo Sucahyo. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan, Ridwan Harris. Narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Eko Setiawan, beserta anggota Komite Komunikasi Digital (KKD) Kabupaten Pasuruan yang terdiri dari unsur perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Praktisi, Akademisi serta Media atau wartawan.

Eko Setiawan, dalam paparan materinya yang berjudul "Membangun Ruang Digital Yang Sehat" menyampaikan dalam membangun ruang digital yang sehat, khususnya dalam memberikan edukasi digital kepada masyarakat terkait informasi yang beredar di media sosial, Komite Komunikasi Digital (KKD) menjadi solusi sebagai lembaga yang dapat membantu memvalidasi kebenaran sebuah informasi atau berita.

Lebih lanjut, Eko Setiawan memperkenalkan sebuah situs website yang dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat untuk memverifikasi, menganalisa, hingga memvalidasi kebenaran berita melalui website klinikhoaks yang dikelola Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur.

Mengacu kepada Peraturan Gubernur Nomor 188 /275/KPTS/013/2022 dan Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 489/739/HK/424.013/2023 tentang Komite Komunikasi Digital (KKD) di Kabupaten Pasuruan Tahun 2023, yang antara lain mengatur tugas dan fungsi KKD. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan, Ridwan Harris dalam sambutannya menyampaikan setiap instansi, lembaga, komunitas yang tergabung

dalam KKD dapat memberikan pencerahan, verifikasi dan menjadi sarana komunikasi bagi setiap sumber daya manusia untuk bersama-sama memutuskan, merencanakan, serta menindaklanjuti terhadap konten-konten atau berita yang memuat informasi tidak benar dan mengandung hate speech, hoax dan disinformasi yang dapat mengganggu stabilitas masyarakat.

Berkaitan dengan tahun politik di pemilu 2024, Ridwan Harris menyampaikan KKD harus menjadi garda terdepan dalam menciptakan kondusifitas pemilu, serta diperlukan adanya sinergitas antara pemerintah dan komunitas melalui forum KKD yang sudah terbentuk.

Diakhir sambutannya, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan berharap adanya keberlanjutan dari forum Komite Komunikasi Digital serta menjadi forum yang dapat meng-counter semua informasi yang beredar dan tidak terbatas pada informasi tertentu.

"Tindak lanjut dari kegiatan ini kita bisa saling sharing, serta membentuk komunikasi melalui media sosial untuk membahas isu aktual terutama terkait digitalisasi. Selain itu, KKD dapat menjadi counter terkait informasi yang beredar di masyarakat" tutupnya. (Robiatul, Ar)



Menghadirkan narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Eko Setiawan.

Photo of This Week



STMJ & Bakso Sakera Raih TOP INOVASI KOVABLIK 2023



PJ Bupati in Frame



Anugerah Santri



Rakor Komite Komunikasi Digital



November Rain



Batik Fashion Fair



DALAM RANGKA MEMASUKI TAHUN POLITIK
SEBAGAI ASN HARUS NETRAL

POSE YANG DILARANG UNTUK ASN



**MARI SUKSESKAN
PILEG, PILPRES,
PILKADA 2024**

POSE YANG DIBOLEHKAN



Dr. Andriyanto, SH, M.Kes
Pj Bupati Pasuruan